

Evaluasi Fungsi Subpusat Pelayanan Kota (SPK) Sadang Serang sebagai Pusat Pelayanan Sub Wilayah Kota (SWK) Cibeunying

¹Andhika Ramadhan Wicaksono, ²Ernawati Hendrakusumah

^{1,2}Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹dhikaramadhanw@gmail.com

Abstract. In the referrals of the structure of space, the planning activities are intended to set the its regional function serving the greater area as a form of agglomeration between region. Additionally on spatial plans, the structure spatial also enclosing the network between region that affect the position of the region itself. The issues about the position of the central region activities as a structural plans also happen in the greater city of Bandung. Currently the city of Bandung who known as a metropolitan area, are encountered by the rapid growth development. Therefore, several region who assigned to be a service central of the regions, the sub center of regions, and the central of neighborhood in Bandung, are suffered by the load of service who caused by the rapid development itself. Based on the regulation in the city of Bandung who stated in Perda Kota Bandung No 16 Tahun 2011 about Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung, City of Bandung itself divided into hierarchical structural of the central regions services who known as pusat pelayanan kota (PPK), Sub Wilayah Perkotaan (SWK), and Subpusat Pelayanan Kota (SPK) who instructed to serve different activities around. This Situation also happen in one of sub center regions in Bandung who known as SPK Sadang Serang. The SPK's who stated in Perda Kota Bandung No 16 Tahun 2011 about Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung, City of Bandung, are intended to be the central region who serve multiple activities such as the central of economical activities, social activities, and administrative who named to serve the greater area known as SWK. In regards, SPK Sadang Serang who instructed to serve the area of SWK Cibeunying, has not been works based on the needs of services to the greater area of SWK Cibeunying. This can be based on the completeness of service facilities in the area of SPK Sadang Serang that not yet to meet the needs of service of SWK Cibeunying. Then based on the background which has been described, the general formulation of problem in this study is "How far SPK Sadang Serang works as a central activities region who serve SWK Cibeunying?". Furthermore, the aim in this study is to produce a study on the ability of function services SPK Sadang Serang to the area of SWK Cibeunying. In support of this research method of data collection the survey methods used are primary and secondary survey with the results of the collection of such data processed through the analysis of the level of service facilities owned SPK Sadang Serang and needs analysis service fulfillment facilities SPK Sadang Serang with reference to the spread facilities around the region. And also with the process will be known the ability position the SPK Sadang Serang as central service for SWK Cibeunying refers to level of service facilities.

Keywords: Evaluation, Sub center of city services (SPK), Services Facilities.

Abstrak. Dalam arahan struktur ruang wilayah, kegiatan penataan ruang dimaksudkan sebagai pengaturan kedudukan fungsi suatu wilayah dalam melayani wilayah yang lebih besar sebagai bentuk aglomerasi kegiatan antar wilayah. Selain itu dalam rencana struktur ruang pun dikenal pula mengenai rencana jaringan yang sangat mempengaruhi kedudukan suatu wilayah terhadap wilayah lain disekitarnya. Permasalahan mengenai kedudukan pusat wilayah pun terjadi pada tatanan sistem struktur ruang wilayah di Kota Bandung. Saat ini Kota Bandung sebagai salah satu wilayah perkotaan metropolis mengalami pertumbuhan yang sangat pesat yang diakibatkan oleh pembangunan. Secara tidak langsung dengan keadaan ini beberapa wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah pusat pelayanan, wilayah subpusat, dan pusat lingkungan di Kota Bandung mengalami berbagai permasalahan akibat dari semakin tinggi beban pelayanan pusat-pusat wilayah tersebut terhadap jumlah penduduk yang terus berkembang secara sporadis. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung No 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung, wilayah administratif Kota Bandung secara umum terbagi menurut sistem pusat pelayanan wilayah yang berhirarki dari kedudukan wilayah sebagai pusat pelayanan kota (PPK), sub wilayah perkotaan (SWK), hingga subpusat pelayanan kota (SPK) yang masing-masing melayani wilayah terkait fungsi yang diarahkannya. Keadaan ini pula yang terjadi pada wilayah pusat pelayanan SPK Sadang Serang. SPK sendiri menurut kedudukannya seperti yang telah dijelaskan pada Perda Kota Bandung No 16 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung dimaksudkan sebagai suatu wilayah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan atau administrasi yang secara geografis melayani satu sub wilayah kota atau juga disebut SWK. Dalam kaitan SPK Sadang Serang yang berfungsi sebagai wilayah subpusat pelayanan kota

SWK Cibeunying pun dapat dikatakan masih kurang tercermin berdasarkan pada kemampuan wilayah SPK Sadang Serang yang dinilai masih belum dapat memenuhi kebutuhan pelayanan untuk skala cakupan SWK. Hal ini dapat didasarkan pada kelengkapan fasilitas pelayanan yang ada pada wilayah SPK Sadang Serang yang secara jenisnya belum dapat memenuhi kebutuhan pelayanan SWK Cibeunying. Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah secara umum dalam penelitian ini adalah “Sejauh mana subpusat pelayanan kota (SPK) Sadang Serang berfungsi sebagai wilayah pusat pelayanan sub wilayah kota (SWK) Cibeunying?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah menghasilkan suatu kajian mengenai kemampuan fungsi pusat pelayanan SPK Sadang Serang terhadap SWK Cibeunying. Dalam mendukung penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey primer dan survey sekunder dengan hasil dari pengumpulan data tersebut diolah melalui analisis tingkat pelayanan fasilitas yang dimiliki SPK Sadang Serang dan analisis kebutuhan pemenuhan pelayanan fasilitas SPK Sadang Serang dengan mengacu pada persebaran fasilitas sekitar wilayahnya. Maka dengan dilakukannya proses tersebut akan diketahui kemampuan kedudukan SPK Sadang Serang sebagai subpusat pelayanan bagi SWK Cibeunying yang mengacu pada tingkat pelayanan fasilitasnya.

Kata Kunci: Evaluasi, Subpusat Pelayanan Kota (SPK), Fasilitas Pelayanan.

A. Pendahuluan

Penataan ruang pada penyelenggaraannya secara nasional maupun bagian wilayah, didasarkan pada rencana tata ruang yang telah dilakukan oleh pemerintah sebagai arahan pengembangan wilayah yang mengacu pada karakteristik perkembangannya yang tertuang dengan jelas pada rencana pola ruang dan struktur ruang wilayah. Masing-masing jenis rencana seperti rencana pola ruang dan struktur ruang wilayah pada dasarnya dilakukan sebagai langkah arahan perkembangan dan pembangunan suatu wilayah demi terpenuhinya keadaan wilayah yang dapat menampung segala kebutuhan masyarakat. Pada jenis arahan rencana pola ruang, arahan ini dimaksudkan sebagai langkah pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang dihasilkan dari pertimbangan pemanfaatan ruang menurut karakteristik serta potensi yang dimiliki wilayah tersebut yang selanjutnya pula diatur mengenai intensitas pemanfaatan ruang dan arahan pengendaliannya melalui peraturan zonasi. Sementara itu dalam arahan struktur ruang wilayah, kegiatan penataan ruang dimaksudkan sebagai pengaturan kedudukan fungsi suatu wilayah dalam melayani wilayah yang lebih besar sebagai bentuk aglomerasi kegiatan antar wilayah. Selain itu dalam rencana struktur ruang pun dikenal pula mengenai rencana jaringan yang sangat mempengaruhi kedudukan suatu wilayah terhadap wilayah lain disekitarnya. Dalam pembahasan rencana struktur ruang yang menjelaskan mengenai kedudukan suatu wilayah terhadap wilayah lain, dikenal kedudukan wilayah sebagai pusat wilayah yang diharapkan dapat melayani berbagai kegiatan utama untuk wilayah lain yang dicakupnya. Kedudukan suatu wilayah sebagai wilayah pusat didasarkan pada penetapan rencana struktur ruang wilayah yang sudah memiliki kedudukan hukum seperti peraturan daerah

Permasalahan mengenai kedudukan pusat wilayah pun terjadi pada tatanan sistem struktur ruang wilayah di Kota Bandung. Saat ini Kota Bandung sebagai salah satu wilayah perkotaan metropolis mengalami pertumbuhan yang sangat pesat yang diakibatkan oleh pembangunan. Secara tidak langsung dengan keadaan ini beberapa wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah pusat pelayanan, wilayah subpusat, dan pusat lingkungan di Kota Bandung mengalami berbagai permasalahan akibat dari semakin tinggi beban pelayanan pusat-pusat wilayah tersebut terhadap jumlah penduduk yang terus berkembang secara sporadis. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung No 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung, wilayah administratif Kota Bandung secara umum terbagi menurut sistem pusat pelayanan wilayah yang berhirarki dari kedudukan wilayah sebagai pusat pelayanan kota (PPK), sub wilayah perkotaan (SWK), hingga subpusat pelayanan kota (SPK) yang masing-masing melayani wilayah terkait fungsi yang diarahkannya. Keadaan ini pula

yang terjadi pada wilayah pusat pelayanan SPK Sadang Serang. SPK sendiri menurut kedudukan fungsinya seperti yang telah dijelaskan pada Perda Kota Bandung No 16 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung dimaksudkan sebagai suatu wilayah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan atau administrasi yang secara geografis melayani satu sub wilayah kota atau juga disebut SWK. Dalam hal ini kedudukan SPK Sadang Serang dalam struktur wilayah Kota Bandung merupakan suatu wilayah subpusat pelayanan kota yang melayani wilayah SWK Cibeunying. Kawasan di SPK Sadang Serang dan sekitarnya saat ini berkembang dengan pesat sebagai kawasan perdagangan dan jasa namun belum tertata dengan baik. Keberadaannya sebagai suatu pusat dari SWK Cibeunying, kurang strategis, kurang menarik, dan kalah populer dibandingkan dengan wilayah yang dilayaninya, seperti Kawasan Dago, Kawasan Riau, Kawasan Gedung Sate, dan sebagainya. Kawasan – kawasan tersebut menjadi daya tarik yang cukup besar bagi penduduk di luar Kota Bandung untuk berkunjung dan menikmati wisata baik alam, kuliner, dan wisata modern. Hal tersebut menyebabkan kawasan – kawasan tersebut berkembang dengan pesat. Sedangkan SPK Sadang Serang sebagai pusat, kurang dilirik dan berkesan sebagai daerah belakang. Selain itu dalam kaitan SPK Sadang Serang yang berfungsi sebagai wilayah subpusat pelayanan kota SWK Cibeunying pun dapat dikatakan masih kurang tercermin berdasarkan pada kemampuan wilayah SPK Sadang Serang yang dinilai masih belum dapat memenuhi kebutuhan pelayanan untuk skala cakupan SWK. Hal ini dapat didasarkan pada kelengkapan fasilitas pelayanan yang ada pada wilayah SPK Sadang Serang yang secara jenisnya belum dapat memenuhi kebutuhan pelayanan SWK Cibeunying.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah secara umum dalam penelitian ini adalah “Sejauh mana subpusat pelayanan kota (SPK) Sadang Serang berfungsi sebagai wilayah pusat pelayanan sub wilayah kota (SWK) Cibeunying?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah menghasilkan suatu kajian mengenai kemampuan fungsi pusat pelayanan SPK Sadang Serang terhadap SWK Cibeunying

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Teori

Pembahasan mengenai tinjauan teori dikaitkan dengan hubungan ruang lingkup materi pembahasan mengenai evaluasi fungsi subpusat pelayanan kota (SPK) Sadang Serang terhadap sub wilayah kota (SWK) Cibeunying. Penggunaan masing-masing teori didasarkan kepada kebutuhan dalam pemahaman mengenai judul penelitian serta teori-teori yang mendukungnya. Dalam pembahasan ini, teori yang digunakan adalah teori pemahaman menurut ahli yang erat kaitannya dengan kegiatan penyusunan penelitian.

Pembahasan teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Teori Evaluasi Kebijakan

Penggunaan teori evaluasi kebijakan dalam penelitian ini dilakukan mengingat kedudukan SPK Sadang Serang sebagai wilayah subpusat pelayanan kota terhadap SWK Cibeunying yang didasarkan pada kebijakan penataan ruang wilayah Kota Bandung melalui Perda No 16 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggungjawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi

kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2. Teori Pusat Wilayah (*Central Place Theory*)

Secara umum penggunaan teori pusat wilayah dalam penelitian ini didasari pada kedudukan SPK Sadang Serang sendiri terhadap SWK Cibeunying yaitu sebagai wilayah pusat pelayanan dengan cakupan seluruh wilayah yang termasuk dalam cakupan pelayanan SWK Cibeunying. Teori pusat wilayah melalui teori tempat sentral (*Central Place Theory*) kali pertama dikemukakan oleh tokoh geografi berkebangsaan Jerman, Walter Christaller (1933). Christaller mengadakan studi pola persebaran permukiman, desa, dan kota-kota yang berbeda ukuran serta luasnya. Teori Christaller ini kemudian diperkuat oleh seorang ahli ekonomi berkebangsaan Jerman, August Losch (1945). Secara umum konsep dari teori ini adalah dengan memperhatikan *range* (jangkauan pelayanan) dan *threshold* (ambang jangkauan) dari suatu pusat pelayanan menuju wilayah yang dilayaninya. Secara umum teori ini pun membagi suatu wilayah perkotaan menjadi model hirarki pelayanan dengan asumsi bahwa topografi suatu wilayah tidak mempengaruhi keadaan tersebut.

3. Teori *Neighborhood Unit*

Pengaplikasian teori *Neighborhood Unit* dalam penelitian ini adalah sebagai pembentukan unit lingkungan wilayah pusat khususnya pada wilayah SPK Sadang Serang. *Neighborhood Unit* dikenal sebagai suatu konsep untuk merencanakan suatu wilayah yang berlandaskan pada pemikiran sosial psikologis yang diformulasikan oleh Clarence Perry pada tahun 1929. Teori ini mengidentifikasikan setiap *Neighborhood Unit* sebagai suatu unit perumahan yang mempunyai batas yang jelas, besarnya diukur atas dasar keefetifan jarak jangkau pejalan kaki, terjadinya kontak langsung individual, dan adanya ketersediaan fasilitas pendukung kebutuhan sehari-hari. Pada pembahasan lebih lanjut, teori ini pun merangkum seluruh fasilitas publik dan kondisi-kondisi yang diperlukan oleh rata-rata keluarga bagi kenikmatan dan kewajiban hidup disekitar lingkungan tempat tinggalnya. Clarence Perry menyimpulkan bahwa konsep ini mempunyai tujuan utama untuk membuat interaksi sosial diantara penghuni lingkungan permukiman serta kebutuhan ketersediaan fasilitas pelayanan sosial.

Tinjauan Kebijakan

Tinjauan kebijakan digunakan sebagai landasan hukum dari kajian penelitian mengenai evaluasi fungsi subpusat pelayanan kota (SPK) Sadang Serang terhadap sub wilayah kota (SWK)Cibeunying. secara umum adalah untuk mengetahui kedudukannya dalam rencana tata ruang wilayah secara kebijakan spasial serta pengembangan yang diarahkannya secara kebijakan pembangunan. Tinjauan kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya mengutip kedudukan wilayah penelitian pada RTRW Kota Bandung sebagai tinjauan kebijakan spasial dan RDTR Kota Bandung sebagai tinjauan kebijakan arahan fungsi wilayah. Berdasarkan tinjauan normatif pada RTRW Kota Bandung suatu wilayah SPK setidaknya harus dilengkapi fasilitas-fasilitas pelayanan umum yang dapat melayani wilayahnya sendiri dan wilayah lain yang dicakupi oleh wilayah SWK yang dilayaninya. Fasilitas-fasilitas yang dimaksudkan antara lain:

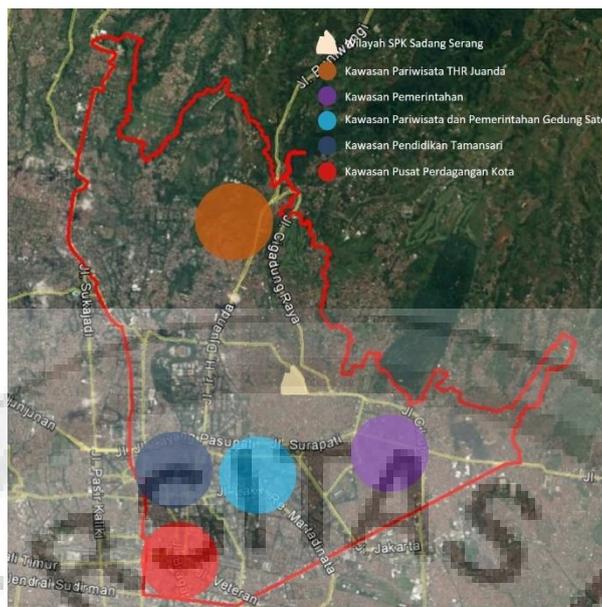
1. Pendidikan : perguruan tinggi dan perpustakaan
2. Kesehatan : rumah sakit kelas C
3. Peribadatan : mesjid dan tempat ibadah lain
4. Bina sosial : gedung serba guna
5. Olahraga/rekreasi : stadion mini, gedung pertunjukan, taman kota
6. Pemerintahan : kantor kecamatan, kantor pelayanan umum, Koramil, Kantor Urusan Agama (KUA)/ Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4)/balai nikah, pos wilayah pemadam kebakaran, kantor pos, telekomunikasi, dipo kebersihan, dan gardu listrik
7. Perbelanjaan/niaga : pusat perbelanjaan/pasar (eceran aglomerasi)
8. Transportasi : terminal transit dan parkir umum

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada umumnya hasil dan pembahasan penelitian mengenai evaluasi fungsi subpusat pelayanan kota (SPK) Sadang Serang terhadap sub wilayah kota (SWK) Cibeunying sendiri dilakukan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya yaitu “Sejauh mana subpusat pelayanan kota (SPK) Sadang Serang berfungsi sebagai wilayah pusat pelayanan sub wilayah kota (SWK) Cibeunying?”. Untuk mengetahui keadaan tersebut diperlukan suatu tinjauan dan analisis mengenai kelengkapan fasilitas pelayanan umum dengan jenis yang telah ditentukan pada Perda Kota Bandung No 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung lalu untuk dapat menilai apakah fasilitas di SPK Sadang Serang tersebut sudah dapat melayani kebutuhan pelayanan wilayah SWK Cibeunying dilakukan pendekatan metode analisis *demand-supply ratio* dan analisis radius pelayanan fasilitas yang mengacu pada standar SNI no 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan. Selanjutnya apabila didalam wilayah SPK Tersebut belum ditemui fasilitas yang diperlukan sebagai upaya wilayah pusat melayani wilayah lain disekitarnya, dilakukan suatu kajian persebaran fasilitas yang memiliki jarak paling ideal terhadap delineasi wilayah SPK dalam pemenuhan kebutuhan pelayanannya. Maka hasil dan pembahasan penelitian ini antara lain:

Potensi Wilayah

Pembahasan mengenai potensi wilayah yang dimiliki SPK Sadang Serang adalah dengan mengacu pada kedudukan wilayahnya pada rencana struktur ruang Kota Bandung yang berkedudukan sebagai wilayah subpusat pelayanan SWK Cibeunying dimana pada pengembangannya seharusnya dilakukan dengan prioritas tinggi. Apabila mengacu pada letak geografis, delineasi wilayah SPK Sadang Serang sendiri berada pada lokasi yang strategis dimana berada pada pertemuan wilayah-wilayah strategis dengan fungsi yang berbeda pada SWK Cibeunying. Keadaan ini sebenarnya sangat menguntungkan apabila dilihat hanya secara letak lokasi SPK yang berada tepat pada pusat wilayah SWK Cibeunying, namun dalam perkembangannya kondisi ini mengakibatkan wilayah SPK Sadang mengalami kemunduran akibat kurang dapat bersaing dengan wilayah-wilayah tersebut, sehingga kesan yang ditimbulkan pada delineasi wilayahnya adalah sebagai daerah yang hanya difungsikan untuk mendukung kegiatan lainnya.



Gambar 1. Letak Delineasi Wilayah SPK Sadang Serang pada Wilayah SWK Cibeunying

Identifikasi Pelayanan Fasilitas SPK Sadang Serang terhadap SWK Cibeunying

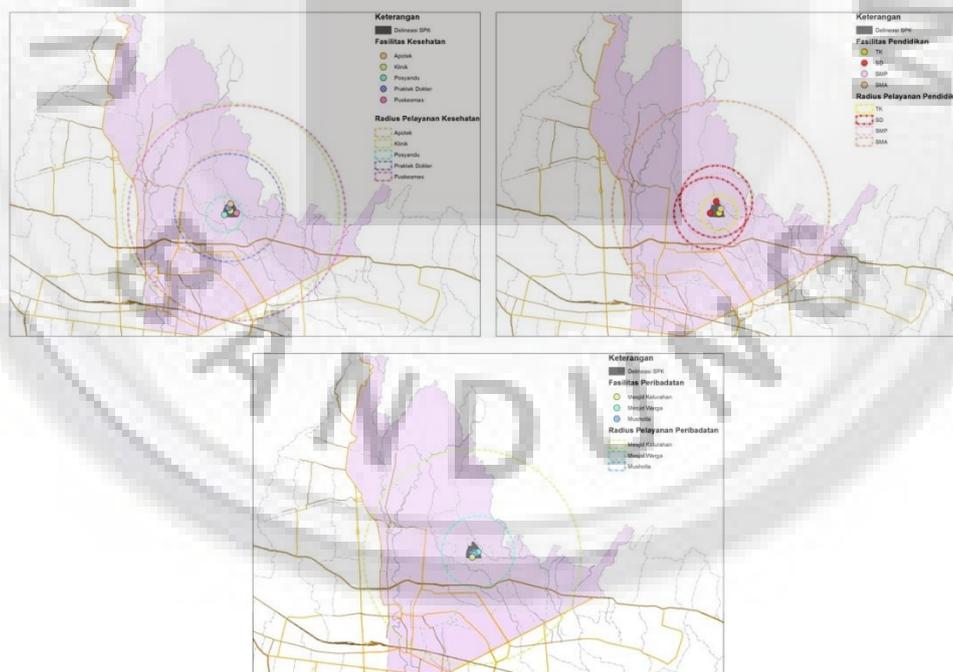
Identifikasi pelayanan fasilitas SPK Sadang Serang terhadap SWK Cibeunying dilakukan dengan meninjau ketersediaan fasilitas dengan mengacu pada Perda Kota Bandung No 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung. Tujuan dilakukannya tinjauan ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat pelayanan yang dapat dicakupi oleh SPK Sadang Serang sendiri pada kedudukannya. Sehingga dengan ini akan diketahui apakah dengan keadaan yang ada saat ini, SPK Sadang Serang sudah mampu berkedudukan sebagai wilayah subpusat pelayanan untuk SWK Cibeunying. Untuk dapat mengetahui kemampuan pelayanan masing-masing fasilitas yang berada pada wilayah SPK Sadang Serang sendiri digunakan metode analisis *demand-supply ratio* dan radius pelayanan yang mengacu pada standar SNI no 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan. Metode ini dilakukan dengan membandingkan jumlah penduduk yang diharapkan akan terlayani oleh fasilitas yang ada (jumlah penduduk keseluruhan SWK Cibeunying) dengan standar pelayanan penduduk masing-masing fasilitas. Maka hasil dari analisis tersebut diantaranya dapat dilihat pada tabel dan peta berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Tingkat Pelayanan Fasilitas yang Berada pada Wilayah SPK Sadang Serang

No	Jenis Fasilitas	Radius Pelayanan (km)	Standar Pelayanan (jiwa)	Jumlah Sarana Eksisting (unit)	Jumlah Penduduk Terlayani (jiwa)	Jumlah Penduduk SPK (jiwa)	DSR
Pendidikan							
1	TK	0,5	1250	1	1250	415578	332,46
2	SD	1	1600	2	3200	415578	129,87
3	SMP	1	4800	1	4800	415578	86,58
4	SMA/SMK	3	4800	1	4800	415578	86,58
5	Akademi/Perguruan Tinggi		70000	0	0	415578	-
6	Taman Bacaan	1	2500	0	0	415578	-

No	Jenis Fasilitas	Radius Pelayanan (km)	Standar Pelayanan (jiwa)	Jumlah Sarana Eksisting (unit)	Jumlah Penduduk Terlayani (jiwa)	Jumlah Penduduk SPK (jiwa)	DSR
Kesehatan							
1	Posyandu	0,5	1250	1	1250	415578	332,46
3	Praktek Dokter	1,5	5000	1	5000	415578	83,12
4	Apotek	1,5	30000	1	30000	415578	13,85
5	Puskesmas	3	120000	1	120000	415578	3,46
5	Klinik	3	120000	1	120000	415578	3,46
Peribadatan							
1	Mesjid	1	2500	2	5000	415578	83,12
2	Langgar	0,1	250	1	250	415578	1662,31
Pelayanan Umum							
1	Lapangan Olah raga		30000	2	60000	415578	6,93
2	Kantor Pos		120000	1	120000	415578	3,46
3	Pelayanan Komunikasi		120000	1	120000	415578	3,46
4	Kantor Urusan Agama		120000	1	120000	415578	3,46
5	Tempat Pembuangan Sementara		120000	2	240000	415578	1,73
6	Kantor Pos		120000	1	120000	415578	3,46
7	Kantor Kelurahan		30000	3	90000	415578	4,62
Perdagangan Regional							
1	Pasar Lingkungan		30000	2	60000	415578	6,93

Sumber : Hasil Analisis 2017



Keterangan: (dari kiri ke kanan), 1. Radius Pelayanan Fasilitas Kesehatan SPK Sadang Serang; 2. Radius Pelayanan Fasilitas Pendidikan SPK Sadang Serang; 3. Radius Pelayanan Fasilitas Peribadatan SPK Sadang Serang;

Gambar 2. Radius Pelayanan Masing-Masing Fasilitas yang Berada di SPK Sadang Serang

Berdasarkan pada analisis tersebut diketahui bahwa didalam wilayah SPK Sadang Serang masih belum tersedia fasilitas-fasilitas yang menjadi kriteria suatu wilayah subpusat pelayanan kota untuk melayani wilayah SWK. Hal ini dapat dilihat dari berbagai jenis fasilitas dengan cakupan pelayanan regional seperti fasilitas pendidikan berupa perguruan tinggi, fasilitas kesehatan berupa rumah sakit tipe C, fasilitas pelayanan umum yang mencakupi rekreasi, olah raga dan fasilitas pelayanan pemerintahan belum ditemukan pada deliniasi wilayah SPK Sadang Serang. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis *demand-supply ratio* dapat diketahui bahwa dengan ketersediaan fasilitas yang ada saat ini SPK Sadang Serang belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan SWK Cibeunying. Mengacu pada jenisnya, fasilitas-fasilitas yang berada pada wilayah SPK Sadang Serang hanya dapat melayani wilayah pada batas cakupan kecamatan, terkecuali untuk ketersediaan fasilitas terminal yang masih dapat dikatakan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Lalu apabila mengacu pada hasil analisis radius pelayanan pun, masing-masing fasilitas diwilayah SPK Sadang Serang belum mampu memenuhi jangkauan pelayanan terhadap wilayah SWK Cibeunying.

Identifikasi Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Fasilitas SPK Sadang Serang

Identifikasi kebutuhan pemenuhan pelayanan fasilitas SPK Sadang Serang sebagai wilayah subpusat pelayanan SWK Cibeunying dilakukan dengan mengidentifikasi persebaran jenis fasilitas yang dibutuhkan dalam memenuhi kriteria pelayanan suatu wilayah SPK dengan memperhatikan jarak antar wilayah SPK ke fasilitas tersebut yang tentunya masih berada pada wilayah cakupan pelayanan SWK Cibeunying. Jenis fasilitas yang akan diidentifikasi pada pembahasan ini adalah jenis fasilitas yang secara umum belum terdapat pada wilayah SPK Sadang Serang dengan jenis yang telah ditentukan pada Perda Kota Bandung No 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kota Bandung. Diketahui berdasarkan hasil tinjauan sebelumnya, jenis fasilitas yang belum terdapat pada wilayah SPK Sadang Serang diantaranya adalah fasilitas pendidikan dengan jenis perguruan tinggi, fasilitas kesehatan berupa rumah sakit tipe C, dan fasilitas pelayanan umum yang mencakupi rekreasi, olah raga. Dengan dilakukannya analisis ini dapat diketahui apakah dengan persebaran fasilitas tersebut wilayah SPK Sadang Serang secara umum dapat terbantu dengan asumsi jarak dan sirkulasi jaringan jalan yang dilaluinya. Selain itu dengan diketahuinya persebaran fasilitas yang menjadi kriteria suatu wilayah dapat dijadikan wilayah subpusat pelayanan kota dapat diidentifikasi wilayah mana yang juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai subpusat pelayanan kota yang melayani SWK Cibeunying. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil analisis ini dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

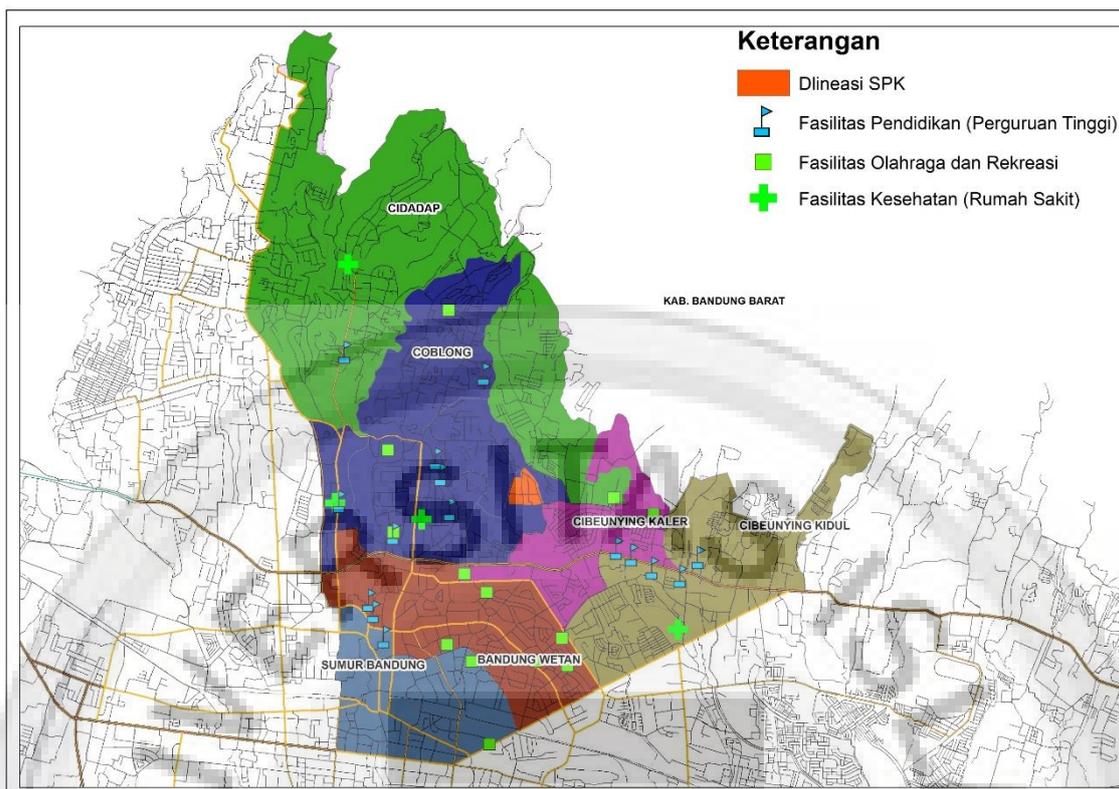
Tabel 2. Hasil Analisis Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas dalam Mendukung Fungsi SPK Sadang Serang

No	Jenis Fasilitas	Standar Pelayanan (Jiwa)	Jumlah Penduduk SWK Cibeunying (Jiwa)	DSR	Jarak dari Wilayah SPK (Km)	Standar Maksimal Jarak yang diperbolehkan (Km)	Keterangan*
Kesehatan (Rumah Sakit Tipe C atau lebih)							
1	RS Santo Boromeus	240000	415578	1,73	1,6	2	A
2	RS Santo Yusuf	240000	415578	1,73	3,6	2	B
3	RS Adven	240000	415578	1,73	4,2	2	B
4	RS Salamun	240000	415578	1,73	5,8	2	B

No	Jenis Fasilitas	Standar Pelayanan (Jiwa)	Jumlah Penduduk SWK Cibeunying (Jiwa)	DSR	Jarak dari Wilayah SPK (Km)	Standar Maksimal Jarak yang diperbolehkan (Km)	Keterangan*
Pendidikan (Perguruan Tinggi dan Perpustakaan)							
1	Institut Teknologi Nasional	70000	415578	5,94	2,1	2,5	A
2	STIE EKUITAS	70000	415578	5,94	2,4	2,5	A
3	Universitas Widyatama	70000	415578	5,94	2,6	2,5	B
4	STMIK Bandung	70000	415578	5,94	2,9	2,5	B
5	Universitas Sangga Buana	70000	415578	5,94	2,5	2,5	A
6	ITB	70000	415578	5,94	3,6	2,5	B
7	UNIKOM	70000	415578	5,94	2,2	2,5	A
8	ITHB	70000	415578	5,94	2,5	2,5	A
9	UNISBA	70000	415578	5,94	3,7	2,5	B
10	UNPAS	70000	415578	5,94	3,8	2,5	B
11	UNPAR	70000	415578	5,94	4,3	2,5	B
12	STBA	70000	415578	5,94	4,2	2,5	B
13	Politeknik Manufaktur	70000	415578	5,94	3	2,5	B
14	UNIBI	70000	415578	5,94	4,9	2,5	B
15	UNPAD	70000	415578	5,94	2,7	2,5	B
Olah Raga dan Rekreasi							
1	Gor C-tra Arena	120000	415578	3,46	1,8	1,5	B
2	Lapangan Gasibu	480000	415578	0,87	2,2	1,5	B
3	SABUGA	120000	415578	3,46	3	1,5	B
4	Stadion Siliwangi	120000	415578	3,46	3,8	1,5	B
5	SAPARUA	120000	415578	3,46	3,8	1,5	B
6	Lapangan Olah Raga Supratman	120000	415578	3,46	2,9	1,5	B
7	Taman Cilaki	480000	415578	0,87	3	1,5	B
8	Taman Ganesha	480000	415578	0,87	3,6	1,5	B
9	Taman Makam Pahlawan	480000	415578	0,87	1,2	1,5	A
10	Gedung Pementasan Seni Rumentang Siang	480000	415578	0,87	5,3	1,5	B
11	Gedung Pementasan Seni Dago Tea House	480000	415578	0,87	5,2	1,5	B
12	Taman Pramuka	480000	415578	0,87	4,4	1,5	B

Sumber : Hasil Analisis 2017

*) Keterangan: A : Fasilitas masih dapat dikatakan mendukung fungsi subpusat pelayanan SPK Sadang Serang berdasarkan jaraknya
 B : Fasilitas sudah tidak dapat mendukung fungsi subpusat pelayanan SPK Sadang Serang berdasarkan jaraknya



Gambar 3. Sebaran Fasilitas Pelayanan disekitar Wilayah SPK Sadang Serang

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Tujuan dalam penelitian ini adalah menghasilkan suatu kajian mengenai kemampuan fungsi pusat pelayanan SPK Sadang Serang terhadap SWK Cibeunying. Maka berdasarkan pada hasil tinjauan lapangan beserta hasil analisis yang dilakukan untuk melihat kemampuan pelayanan SPK Sadang Serang sebagai subpusat pelayanan kota SWK Cibeunying, kesimpulan yang didapat adalah bahwa delineasi wilayah SPK Sadang Serang saat ini belum mampu untuk memiliki kedudukan sebagai wilayah subpusat pelayanan kota yang melayani wilayah sub wilayah perkotaan. Hal ini didasarkan pada ketersediaan masing-masing fasilitas yang harus dimiliki suatu wilayah SPK di SPK Sadang Serang dapat dikatakan kurang. Dalam memenuhi fungsi kebutuhan beberapa pelayanan fasilitas, SPK Sadang Serang sendiri masih harus didukung oleh fasilitas yang berada disekitar wilayahnya dengan mengacu pada jarak dari SPK Sadang Serang sendiri menuju fasilitas tersebut.

Rekomendasi yang dapat dikeluarkan dari hasil penelitian ini adalah pemindahan wilayah subpusat pelayanan kota yang melayani SWK Cibeunying menuju wilayah lain yang setidaknya memiliki potensi dalam pemenuhan pelayanan pada masing-masing jenis fasilitas. Apabila dilihat dari persebaran jenis fasilitas yang berada diwilayah SWK Cibeunying, wilayah yang paling memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi wilayah subpusat pelayanan berada pada sekitar Jalan Pahlawan – Jalan Surapati dan Jalan P.H.H Mustofa – Jalan Cikutra.

Daftar Pustaka

Referensi :

- Abdurahmat, Idris dan E. Maryani. *Handout Geografi Ekonomi*. Bandung. Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, UPI Bandung
- Aniarani Andita, 2001, *Evaluasi Pelayanan Pusat Primer Alun-Alun Kota Bandung*, Institut Teknologi Bandung
- Christaller, Walter, 1966, *Central Places in Southern Germany*, Prentic-Hall, Jerman
- Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Instrumen Pengendalian, Diperoleh 19 Juli 2017, dari <http://pprpt.atr-bpn.go.id/ppr/Instrumenpengendalian>
- Kementerian Pekerjaan Umum, 2005, *Pedoman Evaluasi dan Monitoring*
- Mochamad Ramdhani, 2007, *Arahan Penyediaan Fasilitas Lingkungan Berdasarkan Prefensi Penghuni di Perumahan Adipura Kota Bandung*, Bandung, SAPPK, Institut Teknologi Bandung
- Ndaru Prasetyo dan Bitta Pigawati, 2013, *Evaluasi Fungsi Pusat Kota Wonosobo sebagai Pusat Pelayanan*, Universitas Diponegoro
- Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Risnawati Laelasari, 2008, *Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Studi Kasus : Kecamatan Cidadap)*, UNIKOM
- Pedoman Peraturan :
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Daerah Kota Bandung No 16 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2010-2030
- Peraturan Daerah Kota Bandung No 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Bandung
- SNI 03-1733-2004 tentang Penyediaan Sarana Pendukung Lingkungan Perumahan Diperkotaan